

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kemampuan keuangan daerah mempunyai andil dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2013 dari segi otonomi keuangan. Kecilnya nilai Rasio Desentralisasi Pendapatan mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah dengan nilai 9,82% (sangat kurang). Dalam hal ini akhirnya Pemerintah Daerah mendapatkan predikat Instruktif dalam Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah, sehingga kebijakan apapun yang diambil oleh Pemerintah Daerah banyak dipengaruhi oleh Pusat dan Propinsi. Hal yang senada juga ditunjukkan dengan nilai Rasio Ketergantungan Pendapatan yang sangat tinggi sebesar 90,15% dan juga nilai Rasio Kontribusi BUMD yang sangat kecil sebesar 2,25% dari porsi PAD atau 0,22% dari total penerimaan daerah. Selain itu besarnya Rasio Belanja Rutin dalam anggaran belanja daerah sebesar 82,02% dan Rasio Belanja Pembangunan sebesar 16,10% bias berakibat banyaknya program pembangunan yang tidak mampu untuk dilaksanakan karena tidak dibiayai. Dengan kata lain, kebebasan Pemerintah Daerah dalam mengatur daerahnya sendiri masih

dibatasi. Akan tetapi, untuk keberhasilan pelaksanaan otonomi dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, justru banyak dipengaruhi oleh proporsi anggaran belanja daerah berdasarkan bidang. Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, Kabupaten Nganjuk memberikan porsi yang cukup besar, masing-masing 48,28% dan 13,80%. Hal tersebut berimbas pada tingginya nilai IPM sebesar 72,49, Angka Melek Huruf sebesar 91,16, dan Angka Harapan Hidup sebesar 69,82. Namun hal tersebut tidak terjadi pada bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bidang-bidang yang menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat mendapat porsi yang sedikit, diantaranya bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perumahan, Ketransmigrasian, Ketahanan Pangan, dan Sosial, jika dijumlah hanya mendapatkan porsi sebesar 2,39%. Hal ini berakibat pada nilai yang didapatkan Kabupaten Nganjuk untuk Pendapatan per kapita masih rendah, sekitar Rp 641.550,00 per bulan dan Jumlah Penduduk Miskin sebanyak 29,05% dari total jumlah penduduk.

2. Kinerja keuangan daerah juga mempunyai andil dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2013. Nilai pencapaian IKK sebesar 27,73 (rendah) berbanding lurus dengan Rasio Desentralisasi Pendapatan, sehingga konsekuensi yang ditimbulkan sama. Demikian juga Rasio Pertumbuhan dari masing-masing indikator keuangan menunjukkan gambaran kinerja yang menurun kecuali Desentralisasi Pendapatan yang menunjukkan gambaran yang positif yaitu

naik sebesar 8,89%. Peningkatan kinerja dalam peningkatan PAD juga diperlihatkan oleh nilai Efektifitas PAD yang bagus sebesar 102,40% atau melebihi target. Sehingga untuk kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk rata-rata masih rendah kecuali kinerja dalam peningkatan PAD.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan di atas, peneliti mencoba mengajukan beberapa saran terkait penelitian ini. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 32 tahun 2004, sangat memerlukan kemandirian keuangan daerah agar tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat dapat dikurangi melalui intensifikasi Penerimaan Asli Daerah (PAD). Sehingga untuk waktu-waktu selanjutnya, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa inovasi program kerja untuk meningkatkan penyerapan PAD dan melanjutkan program-program kerja sebelumnya yang dianggap berhasil.
2. Untuk membentuk bentuk anggaran belanja yang memberikan porsi Belanja Pembangunan lebih besar, maka perlu adanya lobi-lobi yang dilakukan dengan pihak DPRD dan pembuatan Perda tentang porsi belanja daerah yang lebih proporsional, dan aturan penggunaan dana untuk operasional pemerintah.
3. Penelitian ini hanya menganalisis beberapa komponen dalam struktur keuangan daerah yang berhasil didapatkan. Untuk penelitian selanjutnya,

perlu adanya rekomendasi penelitian dari instansi pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam hal-hal yang diteliti, sehingga data yang diperlukan dapat diungkap lebih banyak dan lengkap.

4. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa model analisis rasio keuangan dan penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolok ukur keberhasilan otonomi daerah. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan model analisis rasio keuangan yang lebih lengkap sehingga hasil analisisnya lebih lengkap dan menyeluruh, dan diharapkan penilaian atas keberhasilan otonomi daerah menggunakan model penilaian yang berbeda dan lebih lengkap seperti penilaian Otonomi Awards dari The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi.
5. Penelitian ini hanya dilakukan pada tahun anggaran 2013 dengan pengamatan terhadap komponen-komponen yang diteliti pada rentang waktu enam hingga tujuh tahun sebelumnya di Kabupaten Nganjuk saja, diharapkan untuk penelitian selanjutnya obyek penelitiannya dilakukan di beberapa kota sehingga terdapat perbandingan antara kota yang satu dengan kota yang lain.
6. Hasil penelitian ini perlu dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan hal-hal yang lebih dalam, seperti aspek sosio-ekonomi yang lebih mengena dalam hal implementasi otonomi daerah dalam masyarakat, atau aspek etika pejabat pengelola keuangan daerah, dalam hal ini berkaitan dengan masalah korupsi, kolusi, maupun nepotisme.